

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBUJUK ORANG
UNTUK MEMILIH SUARANYA LEBIH DARI SATU KALI
SECARA BERSAMA-SAMA PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH
(Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. Jap)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

AGUS RANIDA
NPM : 71220123109

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana



**MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MEMBUJUK ORANG
UNTUK MEMILIH SUARANYA LEBIH DARI SATU KALI
SECARA BERSAMA-SAMA PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH
(Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. Jap)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

AGUS RANIDA
NPM : 71220123109

Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana

Medan, Oktober 2024

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum) (Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Membujuk Orang Untuk Memilih Suaranya Lebih Dari Satu Kali Secara Bersama-Sama Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. Jap)”**. Tesis ini dimaksudkan untuk untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa proses tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari segala bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak dan pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Danialsyah, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
2. Bapak Prof. Dr. Mustamam, M.Ag selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Bapak Dr.Tajuddin Noor, SH.M.Hum. Sp.N selaku Sekretaris Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.

5. Bapak Dr. Indra Gunawan Purba, S.H., M.H sebagai Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu
6. Seluruh Dosen pengajar beserta para staff yang terlibat dalam Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat serta segala bantuannya kepada penulis.
7. Kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik penulis dari kecil hingga dewasa yang senantiasa memberikan doa dan dukungan hingga saat ini, Mereka memiliki peran yang sangat penting dan tak terhingga, rasanya ucapan terima kasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis;
8. Keluarga penulis dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis hanya dapat mendo'akan, semoga Tuhan YME memberikan limpahan rahmat dan berkahnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya selama ini. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Oktober 2024
Penulis

Agus Ranida

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kerangka Teori dan Konseptual	11
1. Kerangka Teori.....	11
2. Kerangka Konseptual	30
E. Keaslian Penelitian	32
F. Metode Penelitian.....	34
1. Sifat Penelitian	34
2. Metode Pendekatan	35
3. Alat Pengumpulan Data	36
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data ..	36
5. Analisis Data	37
BAB II : PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH.....	39
A. Pengertian Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	39
B. Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah	48
C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilihan Umum	66

BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA ORANG YANG TIDAK BERHAK MEMILIH MEMBERIKANSUARANYA LEBIH DARI SATU KALI SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS/2021/PN. JAP	86
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah	86
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Orang Yang Tidak Berhak Memilih Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Secara Bersama-Sama Dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. Jap.....	93
C. Kebijakan Hukum Pidana Terkait Perbuatan Menyuruh Seseorang Menggunakan Hak Pilih Orang Lain.....	97
BAB IV : PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 6/PID.SUS/2021/PN. JAP	102
A. Tindak Pidana Orang Yang Tidak Berhak Memilih Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Secara Bersama-Sama Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. Jap.....	102
1. Kronologis Kasus	102
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	106
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	107
4. Fakta Hukum.....	108
5. Amar Putusan	111
B. Analisa Putusan Pengadilan Jaya Pura Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. Jap	112
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	118
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA.

:

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- ;2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- ;2018. *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Ardianto Elvinaro. 2018. *Komunikasi Massa : Suatu Pengantar*, Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Andi Hamzah. 2014. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anwar Arifin. 2017. *Komunikasi Politik: Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Aplikasi-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, Jakarta: Graha Ilmu.
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dan Nimmo. 2019. *Komunikasi Politik: Komunikator, Pesan Dan Media*, Bandung: Rosda, 2019
- Danis Puntoadi. 2017. *Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial*, Jakarta: Elex Komputindo.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2014. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Grafika Aditama.
- Djoko Prakoso. 2017. *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Rajawali Press.
- Frans Maramis. 2015. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H. Ishaq. 2020. *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismu Gunadi. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Janedjri M. Gaffar. 2016. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press.

- Jimly Asshiddiqie. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Joko J. Prihatmoko. 2018. *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Josua Sitompul. 2018. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw; Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa.
- Kementerian Agama RI. 2016. *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: Direktorat Jenderal Haji Republik Indonesia.
- Khairul Fahmi. 2016. *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi: Kompilasi Catatan Atas Dinamika Pemilu Dan Pilkada Di Era Reformasi*, Jakarta: RajaGrafindos Persada, 2016.
- Miftah Toha. 2014. *Birokrasi Politik Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Mahrus Ali. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hamdan. 2017. *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Medan: Pustaka Bangsa Press
- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moh. Mahfud, MD. 2019. *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Yogyakarta:Gama Media Offset
- Muhammad Abi Bakr ar-Razi. 2015. *Mukhatasar as-Shihah*, (Beirut: Dar al- Ma'rifah.
- Mulyadi, Dedi, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia dalam Perspektif Indonesia*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012
- Mhd. Teguh Syuhada. 2021. *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan di Indonesia*, Medan: Pustaka Prima.
- Ninie Suparni. 2019. *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 2017. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sukarna. 2017. *Sistem Politik*, Bandung: Alumi.

Teguh Prasetyo. 2018. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.

Tongat. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

Topo Santoso. 2016. *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

B. Jurnal

Alfred B. David Dodu. 2017. "Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015," *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 2, Nomor 1.

Antar Venus. 2014. *Manajemen Kampanye; Panduan Teoritis Dan Praktis Dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Dini Hidayanti Herpamudji. 2015. "Strategi Kampanye Politik Dan Perang Pencitraan Di Media Massa Dalam Pemilu Presiden", *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 6, Nomor 1, Desember 2015.

I Gede Yuliartha, "Lembaga Praperadilan dalam Perspektif Kini dan Masa Mendatang dalam Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia," *Law Reform* Vol. 5, No. 1 (Desember 2020)

Nanik Prasetyoningsih, 2019. "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 2.

Oheo K. Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi di Bawah Minimum Khusus pada Perkara Pidana Khusus," *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 2, No. 2 (November 3, 2017)

Puteri Hikmawati, "Penafsiran terhadap Subjek Pelanggaran Kampanye dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan Ancaman Sanksi Pidananya", *Parliamentary Review*, Vol. 1 No. 1 (2019).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.